

FITRA RIAU DALAM GERAKAN ADVOKASI ANGGARAN DAERAH PROVINSI RIAU



2015-2018

Daftar Isi

- 1** Daftar Isi
- 2** Statistik Fitra Riau
- 3** Struktur Organisasi

BAG I

- 7** LATAR BELAKANG & TUJUAN

BAG II

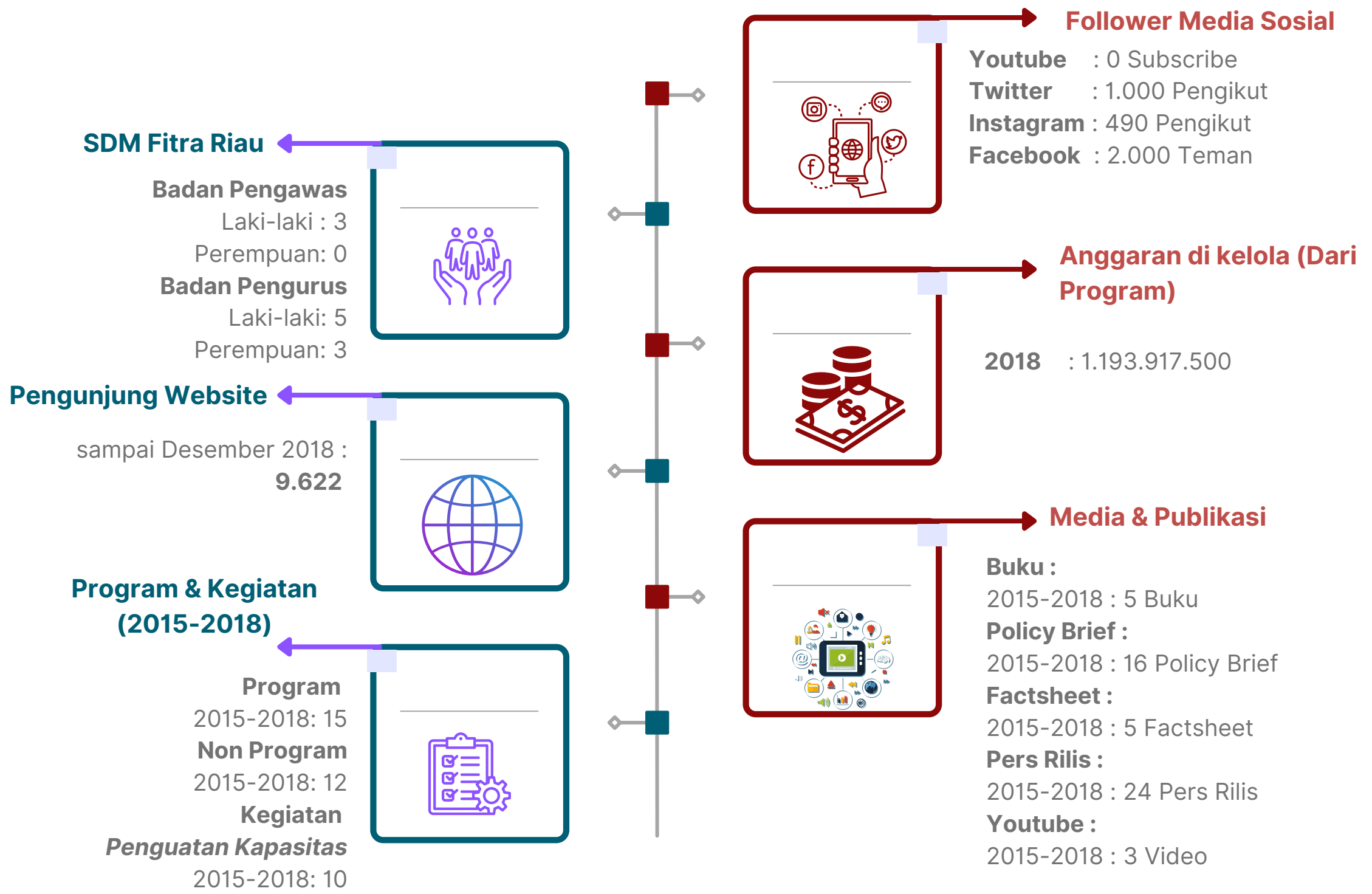
- 8** FITRA RIAU DALAM GERAKAN ADVOKASI ANGGARAN DAERAH
- 9** Memperkuat Kelembagaan Fitra Riau
- 13** Upaya Pengembangan Badget Resource Center (BRC)
- 25** Komunikasi Eksternal dan Networking

- 4** Profil Badan Pengurus
- 6** Profil Badan Pembina/Pengawas

BAG III

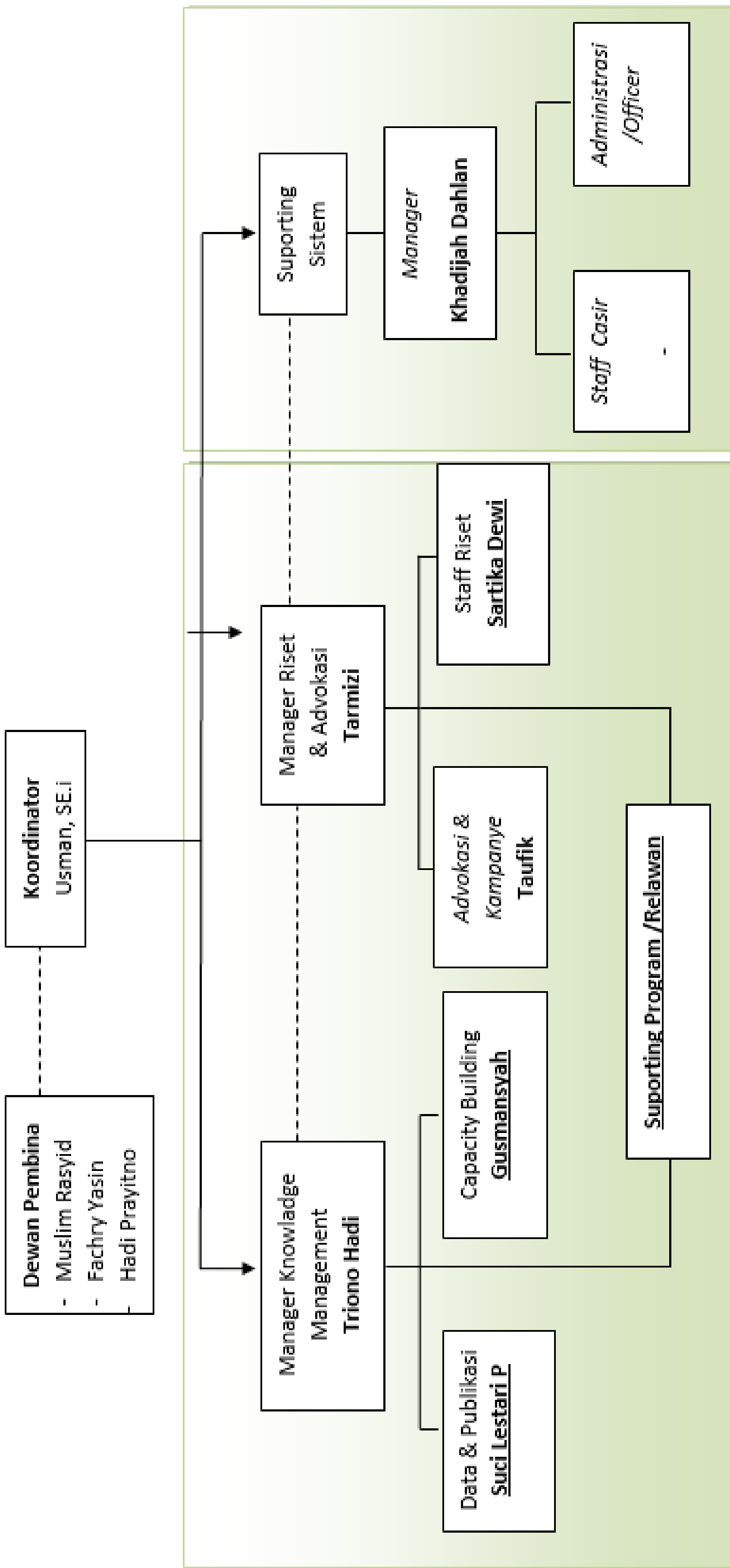
- 28** PROGRAM & KEGIATAN FITRA RIAU
- 29** Program dan Kegiatan FITRA RIAU
- 32** Keberhasilan/Capaian

Statistik Fitra Riau 2015-2018



STRUKTUR BADAN PELAKSANA PERKUMPULAN FITRA RIAU 2018-2021

STRUKTUR ORGANISASI





Badan Pengurus Fitra Riau 2015-2018



Usman

Koordinator Fitra Riau

Usman, Menjadi Koordinator Fitra Riau sejak 2011–2018, merupakan tokoh paling berkontribusi besar dalam perjalanan panjang Perkumpulan Fitra Riau. Ketekunan, kesabaran serta kerja kerasnya berhasil mengembalikan dan merawat eksistensi hingga saat ini. Memiliki keahlian dan pengalaman diberbagai isu. Demokrasi, Pemilu, Keterbukaan Informasi Publik dan Anti Korupsi



Khadijah Dahlan

Manager Keuangan

Khadijah Dahlan,meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Suska Riau. Bergabung di Fitra Riau sejak tahun 2016 hingga sekarang, dengan posisi saat ini sebagai Manager Keuangan di Perkumpulan Fitra Riau 2018-2021.



Triono Hadi

Manager Knowledge
Managemen

Triono Hadi, meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Suska Riau. Bergabung di Fitra Riau sejak tahun 2011 hingga sekarang, dengan posisi saat ini sebagai Manager Knowledge Managemen Perkumpulan Fitra Riau 2015-2018, melanjutkan kepemimpinan selanjutnya ditetapkan melalui musyawarah anggota perkumpulan luar biasa (RAPELUSA) pada 15 Agustus 2018. Memiliki 10 tahun pengalaman advokasi dan technical assistensi kebijakan anggaran daerah, kebijakan publik dan anti korupsi. Berpengalaman sebagai konsultan big data analisis di Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Memimpin pelaksanaan program (program director) di beberapa program kerjasama dengan lembaga TAF dan CLUA. Expert dibidang perencanaan penganggaran responsif gender, Kebijakan Ecological Fiscal Transfer, Budget Tagging Analisis, pendampingan Keterbukaan Informasi Publik.



Tarmidzi

Manager Riset dan Advokasi

Tarmidzi, Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Suska Riau. bergabung di Fitra Riau sejak tahun 2013 hingga sekarang, dengan posisi saat ini sebagai Manager Riset dan Advokasi Perkumpulan Fitra Riau 2015-2018, ia terus mengembangkan skill dan knowledge sampai menjadikannya sebagai ahli atau analis khusus dibidang kebijakan anggaran sektor lingkungan hidup.



Badan Pengurus Fitra Riau 2015-2018



Taufik

Staff Advokasi dan
Kampanye

Lahir di Duri, 25 Maret 1994, pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Fisipol, Universitas Islam Riau, Pekerjaan di Fitra Provinsi Riau dimulai pada Oktober 2015 dari posisi Volunteer, pada 2016 menjadi staf biasa dan pada 2017 posisi sebagai staf advokasi dan 2019 diposisikan sebagai Manajer Advokasi dan jaringan Fitra Riau. Sejak Maret 2016-2018 dipercaya dalam memegang beberapa program donor dimulai dari Asisten Program sampai Program Officer di The Asian Foundation (TAF).



Suci Lestari Putri

Staff Data dan Publikasi

Suci Lestari Putri, Lahir di Pekanbaru, 31 Oktober 1993, pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekerjaan di Fitra Provinsi Riau dimulai pada tahun 2014 sampai sekarang. Pada 2017 posisi sebagai staf sub divisi data dan riset. Tahun 2017 - 2020 dipercaya sebagai Asisten Peneliti Program Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Peningkatan Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Gambut Berbasis Satuan Hidrologi Gambut - Program ICCTF Konsorsium YMI dan Fitra Riau.



Sartika Dewi

Staff Riset

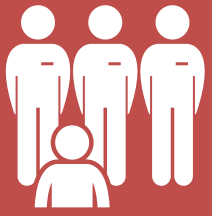
Sartika Dewi, lahir di Bengkalis tepatnya di Desa Meskom Kabupaten Bengkalis, Bergabung dan menjadi anggota Fitra Riau sejak Tahun 2016 hingga sekarang, saat ini sebagai staff Riset Fitra Riau.



Gusmansyah

Staff Peningkatan kapasitas
Internal dan Jaringan

Gusmansyah, S.IP Lahir di Batu Gajah, 02 Agustus 1994, pendidikan terakhir Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau, Berkiprah di Fitra Riau sejak tahun 2016, Sebagai Voluntary, pada tahun 2017 posisi sebagai staff Peningkatan kapasitas Internal dan Jaringan Fitra Riau. Spesialis pada isu kebijakan daerah, konsen melakukan penguatan aparatur pemerintahan desa, seperti perangkat desa dan juga penguatan kapasitas badan permusyawaratan desa (BPD), bersama fitra Riau menghasilkan produk kajian dan policy brief.



Badan Pembina/Pengawas Fitra Riau 2015-2018



Muslim Rasyid, adalah Ketua Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau ditetapkan pada RAPEL pada tahun 2017. Beliau menjabat sebagai Kepala Sub Bidang di kedeputusan III Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Sebelumnya beliau active dalam dunia organisasi masyarakat sipil, sebagai direktur Yayasan Mitra Insani, Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), dengan berbagai pengalaman baik program, pendampingan, dan advokasi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.



A.Z. Fachri Yasin, menjadi anggota Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau ditetapkan pada RAPEL pada tahun 2017, yang pernah sebagai Koordinator Fitra Riau (2005-2006). Beliau berstatus pensiun dosen Faperta UNRI (2005) yang mendalami tentang Agribisnis sebagai sistem dan bidang sosial ekonomi perdesaan. Kini sebagai dosen pengampu di Faperta UIR. Pernah sebagai Dekan Faperta UIR dan UNRI. Waktu berjalan diamanahkan sebagai anggota KPU Kota Pekanbaru (2009-2013), Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Riau (2019-2022) dan Ketua Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) PGRI Riau (2019-2024).



Hadi Prayitno, ditetapkan sebagai anggota Badan Pembina dan Pengawas Fitra Riau sejak tahun 2017 hingga sekarang. Saat ini ia bekerja sebagai Stakeholder Engagement Manager di Wildlife Works. Hadi Prayitno memiliki pengalaman kerja lebih dari 21 tahun baik pada organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, dan instansi pemerintah. Kepakarannya mencakup kebijakan anggaran negara, desentralisasi, pembangunan desa, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola hutan dan lahan, serta peningkatan kapasitas. Ia pernah bekerja di Seknas FITRA, The Asia Foundation, Cardno International (MAHKOTA/SLRT), Tetra Tech International (USAID LESTARI), Abt Associates (KOMPAK), FHI 360 (USAID MADANI), Tenaga Ahli Utama Ditjen PPMD Kementerian Desa PDTT, serta Asisten Staf Khusus Presiden bidang ekonomi dan desa



A. Latar Belakang

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau dibentuk sejak tahun 2004 berada dibawah lembaga Yayasan Riau Mandiri. Fitra Riau dibentuk sebagai gerakan masyarakat mengawal pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dengan mengambil peran pada isu transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik pada sektor anggaran dan pelayanan dasar publik yang meliputi perencanaan, pengawasan. Saat ini, dimulai sejak tahun 2011 Fitra Riau telah menjadikan lembaga yang mandiri dengan berbadan hukum Perkumpulan.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan Fitra Riau seperti, melakukan asistensi untuk mendorong perbaikan kinerja keterbukaan informasi di berbagai daerah di Riau, asistensi dan pendampingan masyarakat untuk penyadaran atas hak-hak informasi publik. Menjadikan budget resource center (BRC) dalam advokasi anggaran berupa penyiapan basis data anggaran, kajian pengelolaan anggaran, kampanye publik dan advokasi litigasi. Disektor pelayanan publik yang telah dilakukan mendorong transparansi pelayanan publik, pendampingan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik serta memastikan kebijakan anggaran yang memadai.

Melalui berbagai pendekatan dan kegiatan diatas, Fitra Riau telah berkontribusi dalam beberapa hal seperti, kebijakan penghapusan bantuan hibah dan bantuan sosial kepada lembaga-lembaga fiktif melalui APBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Meningkatnya kinerja pelayanan informasi publik di kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, dan Provinsi Riau, melalui data dan informasi anggaran meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Penyaluran DBH SDA ke level desa melalui pembaharuan kebijakan ADD berbasis SDA di Kabupaten Pelalawan. Fitra Riau berkontribusi pada upaya untuk mendorong kebijakan yang partisipatif dalam pengawasan implementasi kebijakan pelayanan publik bersama pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, sebagai lembaga yang konsen mengawal kebijakan anggaran melalui strategi Fitra Riau berkontribusi pada peningkatan anggaran untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan anggaran lingkungan hidup. Seiring perkembangan waktu dan berkembang isu, maka hingga saat ini Fitra Riau berperan diberbagai isu lainnya. Seperti mengawal dan pendampingan dalam implementasi UU Desa, pencegahan korupsi dan isu demokrasi salah satunya berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu (Pilkada, Pileg dan Pilpres).

B. Tujuan

Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan organisasi FITRA RIAU terkait kondisi internal dan eksternal, capaian organisasi serta

kelemahan organisasi hingga tahun 2018. Dengan harapan, laporan ini menjadi baseline bagi pengurus FITRA RIAU kedepan dalam mengelola organisasi.

BAGIAN II

FITRA RIAU DALAM GERAKAN ADVOKASI ANGGARAN DAERAH



Sebagai pioner gerakan anggaran, FITRA RIAU memandang sejauh ini gerakan anggaran belum menjadi gerakan sosial oleh berbagai kalangan. Sebagian pemerintah masih resistance dalam pengelolaan anggaran secara terbuka dan melibatkan warganya. Bagi kalangan CSO yang bergerak diberbagai isu belum menjadi isu anggaran sebagai instrument advokasi, bahkan disebagian kalangan menganggap persoalan anggaran adalah persoalan yang tabu, sulit untuk dipahami dan hanya dikuasai oleh para ekonom dan pemerintah. Anggaran sebagai instrumen pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel pada seluruh tahapan mulai dari proses penganggaran dan pelaksanaan. Atas dasar itu, Sejak awal berdiri hingga saat ini, Fitra Riau konsisten menjadikan isu transparansi kebijakan

Anggaran daerah sebagai isu utama organisasi. Lahirnya berbagai regulasi seperti UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dan peraturan lainnya serta komitmen kebijakan yang mendukung keterbukaan dan partisipasi memberi peluang bagi FITRA RIAU untuk terus melakukan gerakan advokasi anggaran hingga menjadi gerakan sosial yang diusung oleh berbagai kalangan. Untuk mencapai hal tersebut, sebagai lembaga yang merupakan jaringan FITRA secara nasional Fitra Riau terus berupaya meningkatkan kualitas kelembagaan internal, memperluas jaringan, dan merekonstruksi strategi gerakan advokasi anggaran yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi FITRA RIAU. Secara lebih jelas berbagai hal yang telah dilakukan FITRA RIAU sejauh ini sebagai berikut:

Memperkuat Kelembagaan FITRA RIAU

Menata Ulang Strategi Gerakan Advokasi Anggaran



Dalam menjalankan mandate gerakan transparansi kebijakan Anggaran daerah FITRA Provinsi Riau menetapkan Visi sebagai berikut:

“Visi Perkumpulan Fitra Provinsi Riau Visi adalah menjadikan lembaga kajian dan advokasi berkualitas serta terpercaya untuk terciptanya tata kelola kebijakan publik dan kebijakan anggaran Negara berpihak terhadap rakyat”.

Untuk mewujudkan Visi Fitra Provinsi Riau menjalankan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Terpenuhinya hak – hak rakyat secara adil dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan alokasi anggaran publik
- Terwujudnya kebijakan anggaran negara yang berbasis dan berorientasi pada kebutuhan rakyat dan terbebas dari korupsi.
- Kualitas penyelenggara / aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin, perempuan, anak, kelompok marginal dan lingkungan hidup.
- Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan anggaran publik melalui pendidikan, kajian dan pendampingan.

- Menjadikan Fitra Riau sebagai acuan bagi wacana dan gerakan transparansi anggaran didaerah dan bagi Indonesia, melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas advokasi.

Pendekatan watchdog menjadi arena advokasi yang dilakukan FITRA RIAU sejauh ini tidak cukup efektif, sehingga diperlukan rekonstruksi strategi gerakan advokasi Fitra Riau yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, FITRA RIAU telah berupaya meningkatkan strategi advokasi yang awalnya 100% dengan pendekatan watchdog meningkat kepada pendekatan lainnya seperti menggunakan advokasi litigasi, membangun kolaborasi monitoring, terlibat dalam perumusan kebijakan, asistensi dalam perbaikan system, dan lain-lain.

Penggunaan strategi tersebut tercermin pada agenda-agenda advokasi Fitra Riau untuk mencapai misi ke 2, 3 dan 4 yang telah ditetapkan. Seperti, FITRA Riau melakukan asistensi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki system layanan informasi publik, terlibat secara teknis dalam perumusan kebijakan (peraturan daerah/ peraturan kepala daerah) di beberapa daerah, asistensi teknis dalam penyusunan rencana anggaran OPD, upaya gugatan peraturan daerah tentang APBD ke mahkamah agung, dan agenda-agenda lainnya.

Memperkuat Legalitas Kelembagaan FITRA RIAU



Pada awal berdirinya Fitra Provinsi Riau pada tahun 2004 lembaga ini belum memiliki badan hukum yang kuat, Fitra Riau hanya bagian terkecil dari lembaga payung yayasan Riau Mandiri. Pada kemudian pada tahun 2012 Fitra Riau keluar dari lembaga payung dan berdiri sendiri dengan berbadan hukum perkumpulan namun legalitas yang dimiliki Fitra Riau hanya akta notaris. Melihat perkembangan FITRA RIAU dari tahun ke tahun dan ekspektasi public terhadap lembaga ini semakin kuat, maka pada tahun 2018 Fitra Riau berupaya untuk memperbaiki legalitas lembaga dengan merubah akta pendirian lembaga serta mendaftarkan diri

kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM). Dengan keluarnya Surat Keputusan Hukum dan HAM ini dapat memperkuat kelembagaan Fitra Riau baik di mata public maupun di mata Donor. Kuatnya legalitas lembaga perkumpulan Fitra Provinsi Riau menjadi kekuatan baru bagi lembaga ini, dan tentunya harus diisi oleh personil-personil yang kuat dan mampu menjawab tantangan kelembagaan serta tantangan yang akan dihadapi di internal lembaga maupun eksternal kelembagaan Fitra Riau.



Penguatan Struktur dan Manajemen Kelembagaan



Pada tahun 2018 secara kelembagaan perkumpulan Fitra Riau sudah memiliki struktur yang lebih lengkap serta diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing bidang. Koordinator bertugas untuk mengorganisir kelembagaan dan masing-masing devisi, koordinator di bantu oleh Deputi bidang Knowledge Management yang bertugas memajemen internal kelembagaan deputi bidang knowledge Manajemen di bantu dua orang staff dalam hal ini staff Data & Publikasi dan staff Capacity building.

Kemudian Devisi Riset & Advokasi di bantu oleh dua orang staff yang terdiri dari staff kampanye dan staff riset. Kemudian struktur kelembagaan perkumpulan Fitra Riau juga ada supporting system yang bertugas untuk

melakukan kerja-kerja administrasi dan keuangan. Capaian sementara dari pembagian peran ini hingga saat ini cukup baik, karena masing-masing devisi yang di bantu oleh staff mempunyai tanggung jawab pekerjaan yang harus di selesaikan. Baik pekerjaan yang berkaitan dengan program maupun kegiatan rutin Fitra Riau. Akan tetapi perlu diakui, bahwa meskipun secara personel badan pengurus organisasi Fitra Riau telah bertambah namun dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas personel dilakukan, baik yang dibuat oleh FITRA Riau sendiri maupun partisipasi penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh organisasi atau institusi lainnya.

Kuantitas Personil FITRA RIAU Dari Masa Ke Masa

Tahun 2010-2012

Staff Inti 
 Kontrak Program
 Relawan 
 Jumlah 

Tahun 2012-2013

Staff Inti 
 Kontrak Program
 Relawan 
 Jumlah 

Tahun 2013-2015

Staff Inti 
 Kontrak Program 
 Relawan
 Jumlah 

Tahun 2016

Staff Inti 
 Kontrak Program 
 Relawan 
 Jumlah 

Tahun 2017

Staff Inti 
 Kontrak Program
 Relawan 
 Jumlah 

Tahun 2018-Sekarang

Staff Inti 
 Kontrak Program
 Relawan 
 Jumlah 

Peta Kapasitas Personil Kelembagaan FITRA RIAU Berdasarkan Urusan

Perencanaan Program (Status_Sedang)

- Memiliki program
- Tidak memiliki personil khusus
- Jaringan belum luas
- Pemahaman isu lemah
- Lemah dalam penulisan proposal program

Data dan Informasi (Status_Sedang)

- Data base manual
- Data lengkap sesuai kebutuhan
- Mudah mendapatkan data dan informasi
- Belum memiliki software data base
- Personil terbatas
- Penguasaan teknologi lemah

Riset (Status_Lemah)

- Kajian spesifik untuk kebutuhan advokasi program
- Penguasaan metodologi personil lemah
- Inisiatif riset lemah

Advokasi (Status_Sedang)

- Belum peka terhadap isu
- Jaringan advokasi minim
- Strategi advokasi (konvensional)

Kampanye & Publikasi (Status_Sedang)

- Menjadi barometer media massa
- Penggunaan medsos
- Penguasaan Teknologi lemah
- Kreatifitas minim

Keuangan (Status_Sedang)

- Sudah bekerja dengan software keuangan
- Personil tidak background akuntansi



Upaya Pengembangan Budget Resource Center (BRC)

Sejak berdiri Fitra Riau konsen pada isu-isu transparansi anggaran terus berupaya mengembangkan strategi untuk mendorong pemerintah yang transparan dan akuntabel. Sejak lahirnya UU No. 14 Tahun 2018 menjadi semangat keterbukaan informasi di Badan Publik, untuk mendorong keterbukaan informasi di Badan Publik, Fitra Riau melakukan upaya-upaya dalam mempercepat praktek keterbukaan informasi di badan Publik, antara lain; Melakukan akses informasi terhadap Badan Publik, Melakukan penguatan kapasitas Badan Publik, Penguatan kapasitas masyarakat, Melakukan pemeringkatan kualitas transparansi, partisipatif dan akuntabilitas kebijakan anggaran daerah yang dilakukan secara berkolaborasi bersama Seknas FITRA.

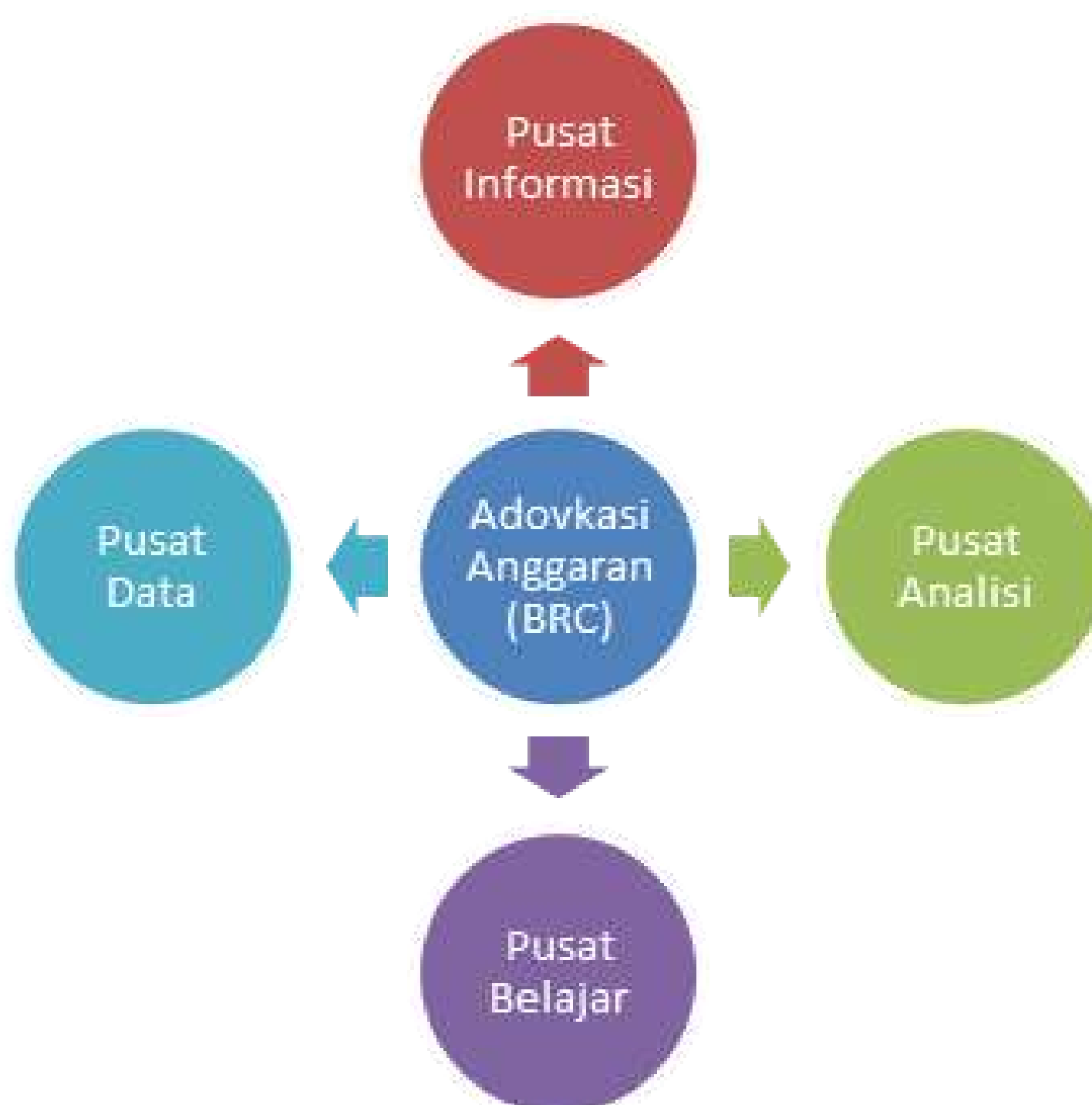
Akan tetapi tidak semua upaya yang dilakukan FITRA RIAU dalam mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah melalui perbaikan system layanan informasi dimanfaatkan oleh masyarakat, komunitas untuk berperan aktif dalam gerakan sosial advokasi anggaran. Meskipun Fitra Riau juga telah berupaya untuk mendorong masyarakat melalui penguatan kapasitas dalam melakukan akses informasi publik.

Atas refleksi persoalan tersebut yang juga dialami oleh jaringan FITRA secara nasional, maka diperlukan upaya seluruh jaringan FITRA secara nasional mengembangkan Budget Resource Center (BRC) atau pusat pengetahuan anggaran.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memperluas gerakan anggaran ditingkat local (Provinsi Riau). BRC memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu sebagai pusat data anggaran, pusat informasi anggaran pusat kajian/analisis anggaran dan pusat belajar anggaran. Keempat fungsi BRC tersebut yang menopang gerakan advokasi anggaran yang dilakukan oleh FITRA RIAU.

Meskipun ditingkat SEKNAS FITRA BRC diinisiasi sejak tahun 2012, namun FITRA Riau baru memulai mengembangkan BRC ini dimulai sejak tahun 2015 diawali sejak adanya program Seknas FITRA terkait penguatan BRC di Simpul Jaringan. Sehingga dalam perjalanannya masih banyak kekurangan-kekurangan hamper pada setiap fungsi BRC itu sendiri. Hal itu disebabkan oleh berbagai factor seperti ketersediaan personil, fasilitas dan kapasitas staff Fitra Riau. Fitra Riau memiliki personil 8 orang baru dimulai sejak tahun 2016, sebelumnya personil FITRA Riau antara 3-4 orang. Sebagiannya hanya sebatas pelaksanaan program bukan staff inti organisasi.

Kendatipun demikian, BRC yang mulai diupayakan berjalan di Fitra Riau ini memiliki peran penting dalam kesuksesan advokasi yang dilakukan. Pendekatan evidence base advocacy atau advokasi berbasis bukti sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas lembaga FITRA RIAU selama ini.





FITRA RIAU Sebagai Pusat Data Anggaran

Untuk mencapai tujuan Fitra Riau sebagai pusat data anggaran dibutuhkan prasyarat berupa pencarian dan penghimpunan data/dokumen dan informasi anggaran dan pengolahan data sebagai bahan baku untuk dianalisis secara lebih detail. Prosesnya Fitra Riau melakukan akses informasi anggaran berupa dokumen – dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan dan anggaran seperti dokumen RPJMD, RKPD, APBD, DPA, LPJ, LHP BPK serta dokumen lainnya yang relevan dengan anggaran. Kemudian dokumen-dokumen yang berhasil di himpun dilakukan input data yang dikumpulkan dalam satu server data, dan diolah menjadi bahan dalam melakukan analisis anggaran untuk kebutuhan advokasi yang dilakukan.

Meskipun upaya tersebut terus dilakukan, namun belum bisa dapat disebut sebagai pusat data anggaran dengan beberapa alasannya: Pertama : FITRA RIAU sejauh ini

hanya mampu mengakses data anggaran untuk Provinsi Riau, selain karena dimudahkan dengan publikasi anggaran oleh pemerintahnya juga sudah memiliki kemudahan untuk akses langsung kepada instansi terkait. Untuk daerah-daerah di Provinsi Riau masih belum mampu dihimpun secara keseluruhan karena tidak semua daerah-daerah mempublikasikan informasi melalui media-media yang tersedia. Kedua: Data yang dimiliki belum dikumpulkan dalam satu server dan dilakukan pengolahan secara rutin dilakukan karena keterbatasan personil serta pemahaman staff yang masih minim dalam melakukan olah data. Ketiga : Publikasi data baku kepublik belum dilakukan, karena tidak memiliki software khusus yang dapat mempermudah dalam mempublikasikan data dan informasi kepada publik secara luas sehingga jika ada kebutuhan data anggaran baik yang diperlukan oleh staff internal Fitra Riau maupun pihak lain yang membutuhkan dilakukan secara manual.

FITRA RIAU Sebagai Pusat Data Anggaran

No	Data/Dokumen	Tahun
1	Serial Data APBD Provinsi Riau dan Perubahan	2009-2018
2	Serial Data APBD Kota Pekanbaru	2010 -2018
3	LHP BPK Provinsi dan Kabupaten Kota Se Riau	2012-2016
4	Serial Data APBD Beberapa Kabupaten	2010-2018
5	Data Setatistik Upadate BPS	
6	Dll.	

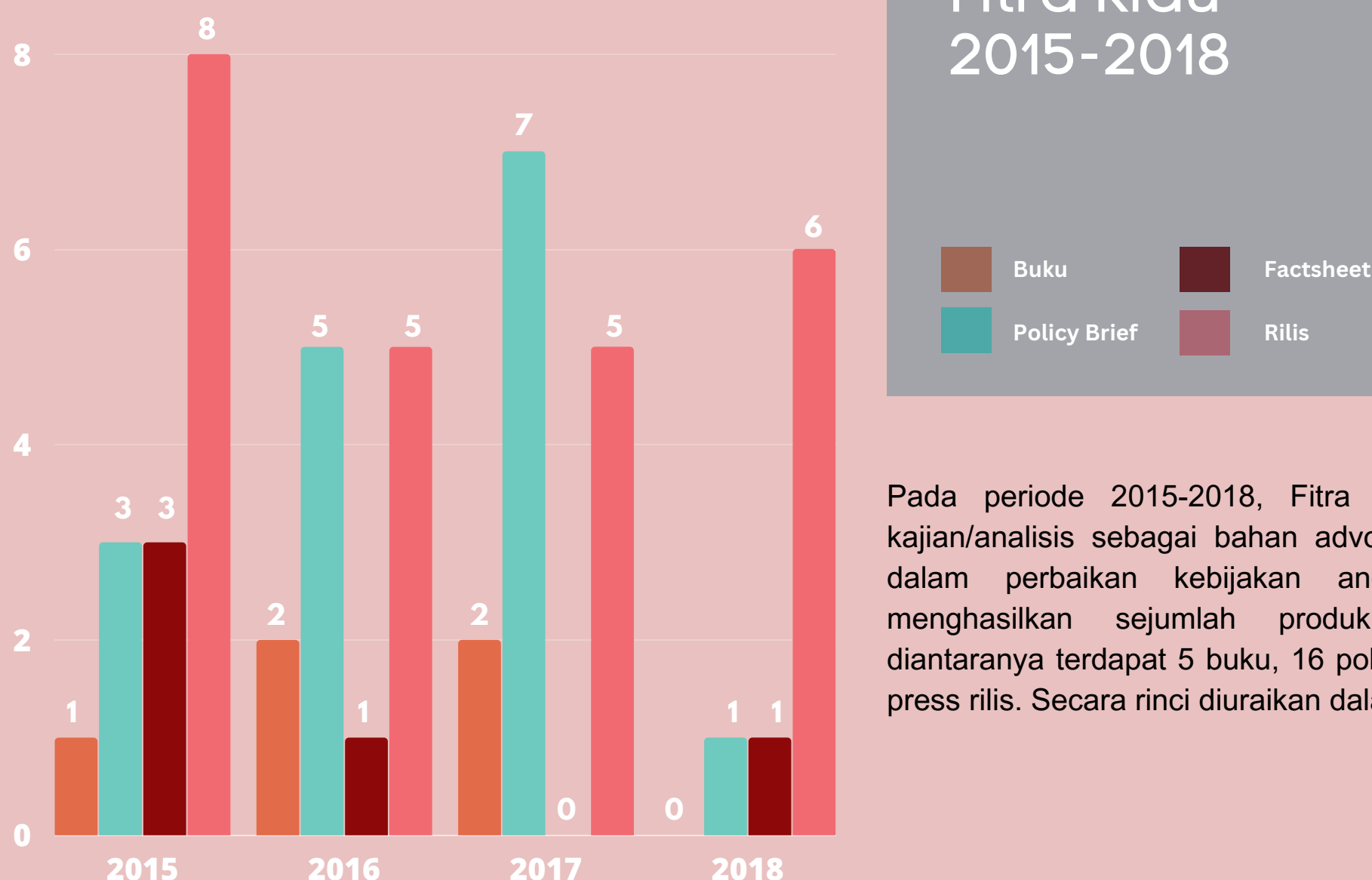
Analysis

FITRA RIAU Sebagai Pusat Analisis/Kajian

Secara terus menerus Fitra Riau telah menghasilkan kajian terkait kebijakan anggaran secara umum, isu anggaran sektoral (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup) baik sebagai mandat organisasi maupun program kerja. Hasil kajian/analisis tersebut diproduksi dalam bentuk policy brief, budget brief, position paper, press release, infografis dan factsheet, sehingga mudah dipahami masyarakat luas.

Berkaitan dengan fungsi analisis, ketersediaan data menjadi penting untuk mendukung kajian/analisis, karna semua kerja-kerja penelitian harus berbasis data baik data primer maupun sekunder seperti dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian yang dilakukan Fitra Riau.

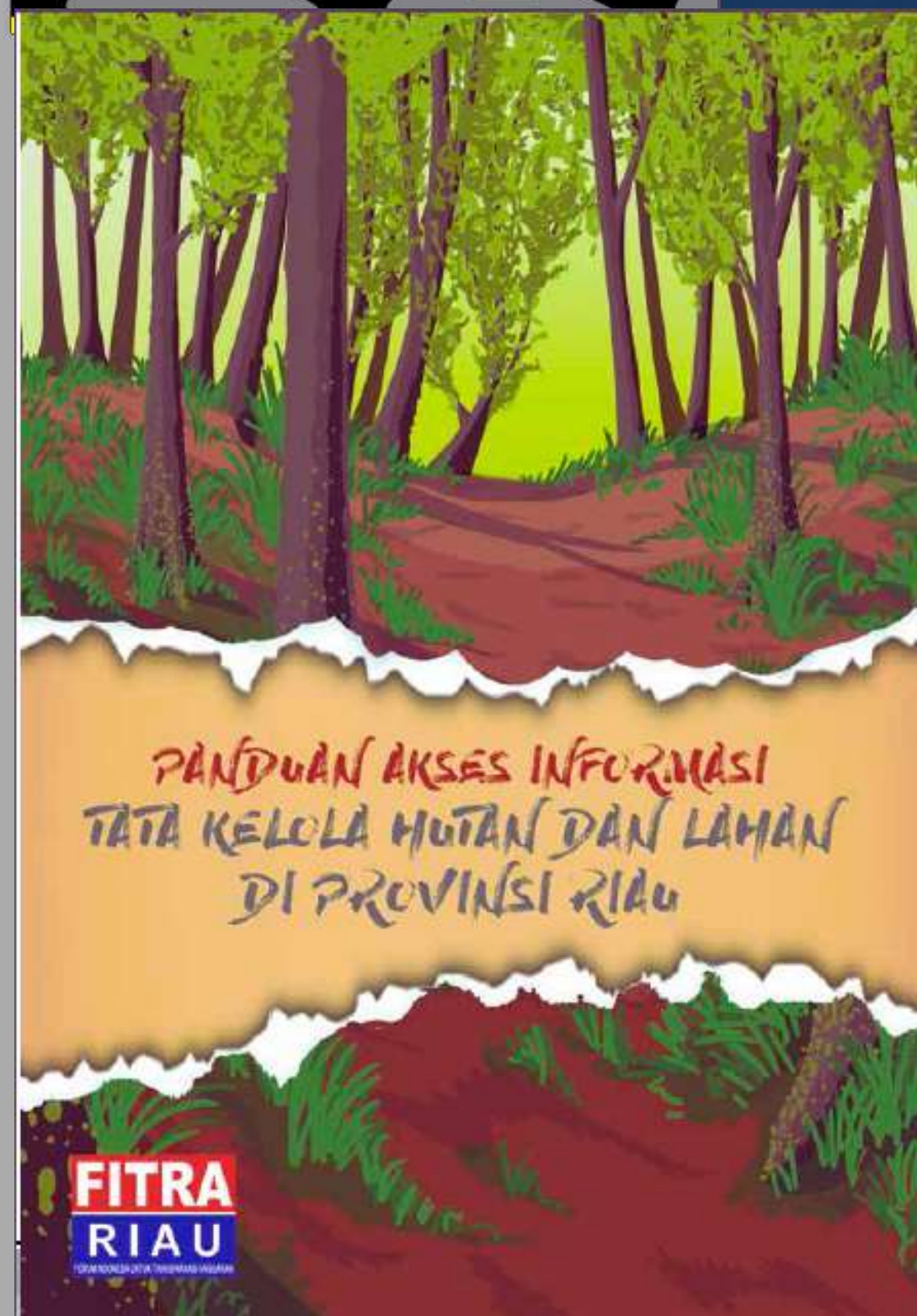
Grafik;
Produksi Hasil
Kajian /Analisis
Fitra Riau
2015-2018



Pada periode 2015-2018, Fitra Riau terus melakukan kajian/analisis sebagai bahan advokasi yang berkontribusi dalam perbaikan kebijakan anggaran daerah, telah menghasilkan sejumlah produk hasil kajian/analisis diantaranya terdapat 5 buku, 16 policy brief, 5 factsheet, 24 press rilis. Secara rinci diuraikan dalam tabel disamping;

Produk hasil kajian/analisis Fitra Riau Periode 2015-2018

BUKU TAHUN 2015-2018



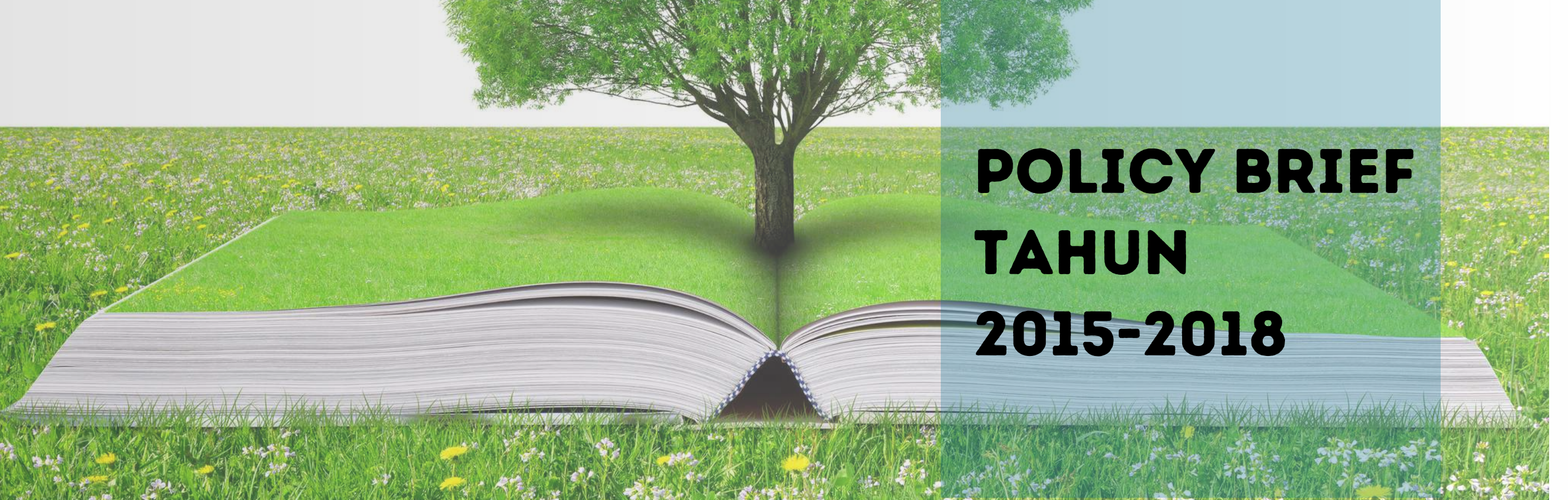
ADD Berbasis SDA - Fitra Riau

BERGERAK DESA:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berbasis Sumber Daya Alam

Inisiatif Kabupaten Pelalawan - Riau Dalam Mendorong Redistribusi Anggaran Desa Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan Dan Lahan





POLICY BRIEF TAHUN 2015-2018

FITRA
Provinsi RIAU
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Policy Brief
16 OKTOBER 2015

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Kemiskinan Multidimensi Di Kabupaten Indragiri Hulu

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Sesuai dengan studi Martin Ravallion (2001), kondisi ini yang disebut dengan jebakan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Tidak selamanya pertum-

tumbuhan yang besar yaitu 8% pertahun. Selain itu, potensi ekonomi yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan dan perdagangan masih mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tapi ironis, tingkat kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu masih berada pada angka 7,50%. Angka ini juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 7,13%

Tahun	Angka Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin
2010	8,85%	1.400.000
2011	8,47%	1.350.000
2012	8,22%	1.300.000
2013	7,72%	1.250.000
2014	8,11%	1.300.000
2015	8,42%	1.350.000

OPTIMALISASI KEUANGAN DESA
Untuk Pencegahan Deforestasi dan Degradasi Hutan Lahan

FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
FITRA
Provinsi RIAU

Policy Brief

Kebijakan Anggaran Pengendalian Karhutla Di Provinsi Riau

2017

FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

FITRA
Provinsi RIAU

Menghitung Potensi Penerimaan Desa di Riau tahun 2015

Rira Baru Anggaran Desa

Pengubahan Rancangan Undang-Undang Desa pada 23 Januari 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), kemudian disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 18 Februari 2014, merupakan awal baru pembangunan desa yang dimulai. Terdapat tiga elemen barul dalam aturan baru terkait desa, yaitu yang berkaitan dengan Atas, Kekukuhn serta anggaran.

Sebelumnya Desa hanya mendapat anggaran yang berasal dari pemerintah Kabupaten / Kota atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu, karena desa diberikan sebagai sub ordinat dari kabupaten/kota. Penggabungan pasal 212 UU 32 tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) harus diawali dengan adanya pembagian urusan kewenangan kabupaten/kota kepada desa yang diikuti dengan penyiapan berupa ADD.

Pasal 72 UU 6 tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa pendapatan desa berasal dari (1)Pendapatan Asli Desa, (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (3)Bantuan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, (5)Bantuan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa yang berasal dari APBN, sebesar 10% dari dana alokasi desa transfer pusat ke daerah. Jika tahun 2015 Dana tran-

sipt yang diberikan kepada desa mencapai Rp. 600 triliun, maka APBN harus menambah alokasi anggaran sebesar Rp. 40 triliun untuk diberikan kepada desa se Indonesia yang jumlahnya lebih kurang 73.000 desa.

Selain dana desa yang berasal dari APBN, Desa juga berhak atas dana yang berasal dari APBD dalam bentuk ADD. Pasal 72 ayat 4 menyatakan bahwa Kabupaten harus mengalokasikan 10% dari dana perimbangan (DBH dan DAU) untuk ADD. Kabupaten/ kota juga diberikan mandat untuk memberikan 10 persen alokasi anggaran yang berasal dari pajak dan retribusi daerah untuk dibagi kembali kepada desa. Untuk Dana Kompositus ini memang sudah ada sejak zaman lama, bedanya UU Desa yang baru terdapat bahwa jika desa tidak memberikan hak sepenuhnya kepada pemerintah desa sebanyak 10 persen dari dana perimbangan untuk ADD.

Jika Kabupaten/ Kota tidak memberikan sepenuhnya dana ADD sebesar 10% dari DBH + DAU, maka pemerintah akan melakukan pemotongan dan trans pemotongan tersebut akan dalam bentuk pemotongan untuk Alokasi Dana Desa Alokasi Khusus yang sebelumnya dituangkan ke Desa.

April 2015

Rasionalisasi Anggaran Prioritas Untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016

FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
FITRA
Provinsi RIAU

FITRA
Provinsi RIAU

POINT PENTING:
- Ketersediaan sumber daya alam di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
- CSDH Pemas memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah.
- CSDH Pemas memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah.
- CSDH Pemas memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah.

Optimalisasi Pemanfaatan DBH Migas Untuk Pembangunan Desa Penghasil dan Sekitar Tambang

Pendahuluan

Desentralisasi memberikan kemandirian bagi daerah, berupa pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mengatur penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya yang diatur dalam UU 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan yang berkaitan dengan kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang bersifat publik, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pelayanan umum, tata ruang dan lain sebagainya. Salah satu kewenangan tersebut, desentralisasi juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelola kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pusat dan daerah termasuk dibidang pembangunan dari bagi hasil yang diperoleh dari pengalihan sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah.

Bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti daerah-daerah penghasil Migas dan pertambangan umum lainnya, akan sangat berpengaruh untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan tersebut dengan prioritas masalah yang ada. Dengan demikian fiscal equalization sangat penting yang dimiliki oleh target mendasar untuk membantu pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk lebih memperbaiki taraf hidupnya.

Alan sangat tidak dapat dipungkiri semakin desentralisasi administrasi pemerintahan urusan dan desentralisasi fiskal, bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti daerah

penghasil minyak dan gas bumi yang berpotensi memiliki kemampuan fiskal yang tinggi untuk menghadapi "hutukan" sumber daya alamnya untuk pembangunan menjadi bagian dari "kubuk". Bagi area wilayah desa penghasil dan non penghasil. Bahkan daerah yang menjadi wilayah non penghasil sumber daya alam justru menjadi kantong-kantong kemiskinan dan wilayah terbelakang. Fenomena yang besar namun non-inklusi ini salah satunya justru disebabkan ketergantungan dan keterbatasan pembangunan ekonomi pada pendak yang tidak berkesinambungan dan dapat mengancam jangka kemiskinan yang dit.

Fenomena yang mendominasi dengan "hutukan sumber daya alam" tersebut mulai tampak di Kabupaten Indragiri Hulu, kota dari dikelas kabupaten penghasil minyak dan gas bumi serta pertambangan lainnya di Provinsi Riau. Meskipun tidak sepenuhnya adalah fenomena "hutukan" sumber daya alam, namun fenomena ini sudah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari hasil pengalihan sumber daya alam. Kabupaten dengan jumlah penduduk 402.201 jiwa, dengan pendapatan per kapita mencapai 29.400 juta atau 7,30 persen dari rata-rata penduduk tahun 2013, jumlah penduduk masih tahun 2013 justru lebih tinggi dari tahun 2012.

FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
FITRA
Provinsi RIAU

Policy Brief

SKEMA PENDANAAN PERHUTANAN SOSIAL

FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
PROVINSI RIAU
FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Policy Brief

KEBIJAKAN ANGGARAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PELALAWAN

FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Policy Brief

Menata Ulang Kebijakan Anggaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hulu

FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Policy Brief

Menata Ulang Kebijakan Anggaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau

FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN
PROVINSI RIAU
FITRA
Provinsi RIAU

Policy Brief

Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Akselerasi

Implementasi Perhutanan Sosial

2017

FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Policy Brief

Redesain Pola Pemanfaatan Dana Reboisasi

2017

FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau

Policy Brief

KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH TERHADAP PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP

PROVINSI RIAU TAHUN 2018

FITRA
Provinsi RIAU

Di Produksi oleh:
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau



FACTSHEET TAHUN 2015-2018

- Audit LHP 2014, pemerintah tidak patuh negara RUG
- Menanggulangi kemiskinan melalui data multidimensi di Indragiri Hulu
- Membagi DBH Migas sampai ked Desa di Kabupaten Indragiri Hulu
- Potensi Dana Desa Tahun 2016
- Rekomendasi bersama KI Sumatera
- Skema pembiayaan Karhutla & Perhutsos di Provinsi Riau 2018

PERS RILIS TAHUN 2015-2018

- Tutup ruang gerak mafia migas dengan transparansi
- Sekda riau langgar UU tutupi informasi hibah dan bansos riau
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik
- Merajut kesejahteraan desa penghasil dan sekitar tambang.
- Komitmen dan keterbukaan akuntabilitas keuangan partai politik diriau rendah.
- Fitra riau prediksi penyerapan APBD riau 2015 hanya 61%,birokrasi amburadul, rugikan rakyat.
- Anggaran plesieran anggota DPRD riau, empat kali lipat anggran karhuta.
- Transparansi dan akuntabilitas parpol diriau buruk
- Fitra riau dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi menolak “revisi UU KPK”
- Riau kekurangan DBH PSDH dan DR mencapai Rp. 795,9 M
- Rencana APBD-P riau 2016 “mengebiri” anggaran karhutla lebih kecil dari belanja tiga orang pimpinan daerah
- Penyerapan APBD Riau 2016 diprediksi hanya 67% bantuan keuangan ke desa harus tetap di oenuhi.
- “REMBUK TRANSPARANSI” pemerintah harus memperbaiki kinerja keterbukaan informasi semua sector.
- Penggunaan pajak penerangan jalan dipertanyakan, pemko harus terapkan system hemat energy.
- Gubernur harus keluarkan SK perpanjangan komisioner KI Riau, komisi A DPRD Riau lalai jalankan tugas.
- Pemborosan APBD Riau tahun 2017, setengah triliun untuk perjalanan dinas.
- Pemrov jangan halangi hak warga mendapatkan informasi, segera tetapkan dan lantik anggota komisi informasi.
- Dewan Riau Boros Anggaran, Kunjungan Hanya Seremonial
- APBD 2018 Provinsi Riau, “bias” arah pembangunan infrastruktur.
- Pemprov riau gagal menghemat APBD, berbagi APBD dengan perjalanan dinas.
- Belanja daerah Provinsi Riau belum efesien
- Anggaran Daerah Belum Berpihak Terhadap Penyelamatan Lingkungan Hidup
- Anggaran Minim Karhutla Terus Terjadi, Pemda harus efektifkan Penggunaan DR
- Serapan APBD Rendaj, Pemda Getol Belanja Aparatur, Lelet Belanja Publik

FITRA RIAU Sebagai Pusat Publikasi dan Informasi

Pusat informasi dan publikasi yaitu menyajikan informasi anggaran yang mudah dipahami publik dalam bentuk pasif dan aktif. Dalam bentuk pasif yaitu publikasi hasil kajian dan analisis anggaran melalui website www.fitrariau.org yang disebarluaskan melalui facebook, twitter, instagram dengan maksud untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal penting dalam kebijakan anggaran. Dalam bentuk aktif yaitu mempublikasikan hasil kajian dan analisis melalui press rilis, media briefing, selain untuk mencari dukungan publik dalam advokasi anggaran juga untuk memberikan pressure terhadap pengambil kebijakan di daerah. Peran publikasi dan informasi yang dilakukan oleh Fitra Riau juga menjadi sajian media massa cetak maupun elektronik.

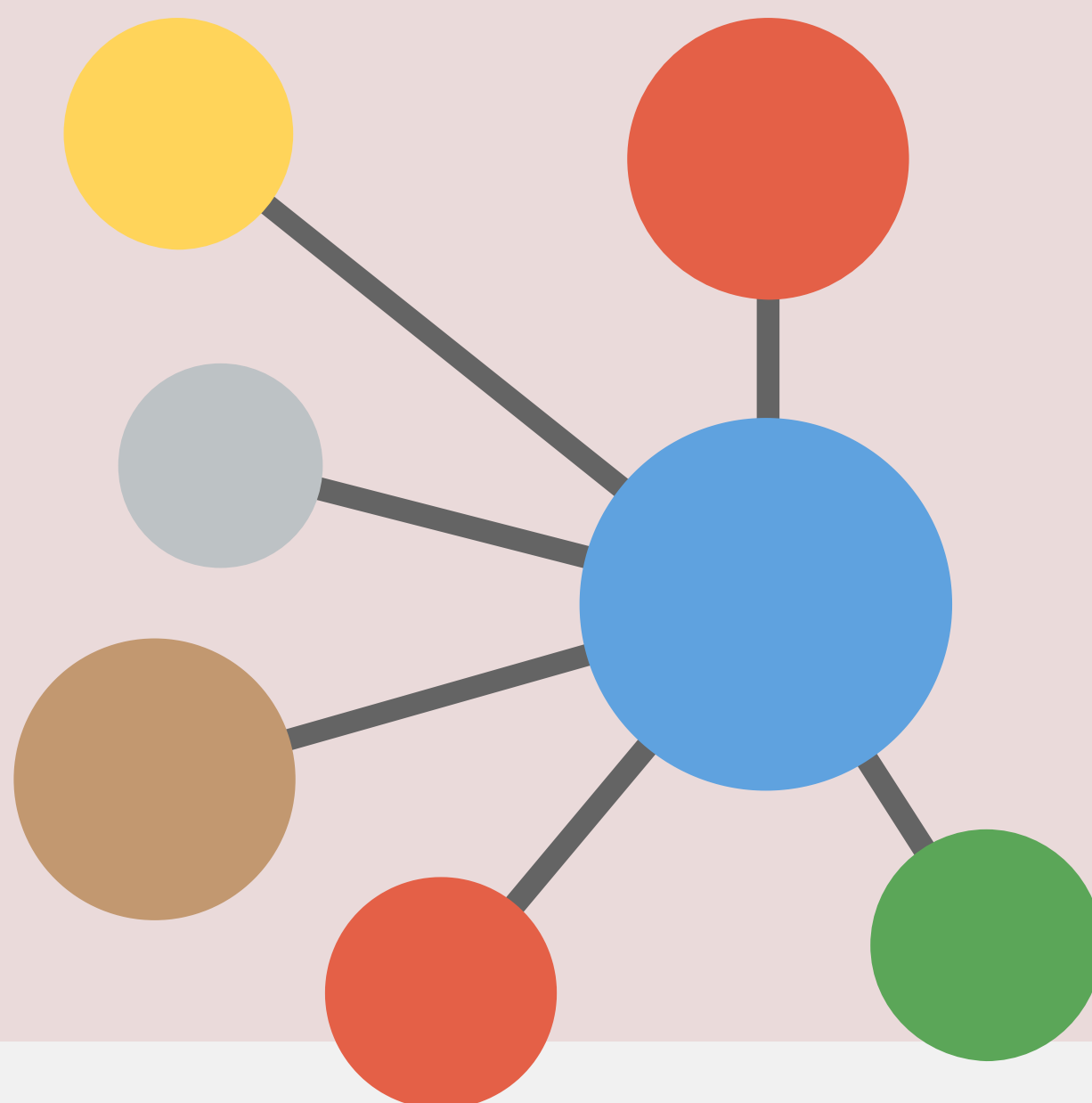


FITRA RIAU Sebagai Pusat Pengetahuan Advokasi Anggaran

Untuk memperluas jaringan dan gerakan advokasi anggaran di daerah adalah dengan menfungsikan FITRA RIAU sebagai pusat pengetahuan anggaran. Pusat pengetahuan anggaran yaitu memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada staff

Fitra Riau, masyarakat, komunitas serta pihak lainnya terkait dengan kebijakan anggaran daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, FITRA Riau telah melaksanakan agenda penguatan kapasitas dan pengembangan jaringan sebagai berikut :

Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Jaringan





Pelatihan Bedah APBD Bersama Komunitas Talang mamak

Penerima Manfaat: Komunitas

Tahun Pelaksanaan: 2015

Program Ford Fondation



Pelatihan Analisis Anggaran dan Magang

Penerima Manfaat: Calon Relawan FITRA RIAU

Tahun Pelaksanaan: 2016

Non Program



Belajar Analisis (BeLA) Anggaran FITRA RIAU

Penerima Manfaat: CSO/Komunitas/ Masyarakat

Tahun Pelaksanaan: 2018

Program SETAPAK -TAF

Selain melalui skema pelatihan formal yang diselenggarakan oleh FITRA RIAU, upaya memperluas pengetahuan anggaran adalah melalui kerjasama seperti kampus, lembaga mahasiswa. Tim FITRA RIAU mengisi diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh pihak – pihak tersebut dengan memberikan pengetahuan anggaran.

Penguatan kapasitas yang dilakukan tidak hanya secara khusus terkait dengan anggaran. Penguatan kapasitas lainnya yang dilakukan sebagai berikut:

No	Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Jaringan	Penerima Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas dan Mendorong Partisipasi Perempuan Terhadap Keterbukaan Informasi Sektor TKHL di Kab. Pelalawan	Kelompok perempuan Desa Gondai	2017	Program Setapak-TAF
2	TOT Bersama Kelompok Perempuan dalam meningkatkan Partisipasi kelompok perempuan dalam isu transparansi	Masyarakat, CSO, komunitas perempuan	2017	Fitra Provinsi Riau
3	Peningkatan Kapasitas dan Mendorong Partisipasi Perempuan, pemuda dan masyarakat Talang mamak Desa aur cina Terhadap Keterbukaan Informasi Sektor TKHL di Kab. Indragiri Hulu	Pemuda dan masyarakat Talang Mamak kab. Inhu	2017	Program Setapak-TAF
4	Upgrading Strategi Pendamping Desa "Mendorong Implementasi Pembangunan Desa Responsif Gender dan Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan	Pendamping desa Kab Pelalawan	2017	Program Setapak-TAF
5	Advokasi Masyarakat dalam mendorong Keterbukaan Informasi	Masyarakat Desa Buruk Bakul, Perangkat Desa dan mahasiswa	2018	Fitra Provinsi Riau
6	Perlibatan masyarakat dalam pencegahan Korupsi	CSO, PEMRINTAH, KPK	2017	Giz
7	Pelatihan Komunitas dalam Pelaporan kasus Korupsi	CSO	2018	GIZ

Strategi lainnya yang dilakukan dalam upaya mengembangkan jaringan advokasi anggaran adalah melalui kolaborasi dengan CSO yang bergerak pada isu sektoral seperti, Lingkungan hidup, perempuan, marginal, dan lain-

lain. FITRA Riau berperan untuk mendorong isu anggaran terinternalisasi dalam advokasi – advokasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.



Komunikasi Eksternal dan Networking

Untuk mempertahankan eksistensi lembaga serta mendukung capaian keberhasilan advokasi Fitra Riau maka meningkatkan komunikasi eksternal dan memperluas jaringan (networking) menjadi keharusan. Untuk itu, selama ini FITRA RIAU mampu mempertahankan komunikasi dan networking, bahkan terus berupaya untuk

memperluas terhadap pihak – pihak eksternal, baik pemerintah, lembaga Negara, Universitas, media massa, NGO local dan nasional. Selain itu, FITRA Riau terus berupaya membangun komunikasi dan berhubungan langsung dengan lembaga donor untuk mendukung advokasi yang direncanakan.

BERIKUT ADALAH PETA KOMUNIKASI EKSTERNAL FITRA RIAU:

Pemerintah Daerah

Provinsi Riau (*Aktivitas Komunikasi*)

- Permudahan akses Data dan Informasi
- Kolaborasi dalam perbaikan layanan informasi publik
- Kolaborasi dalam pencegahan korupsi
- Intervensi kebijakan anggaran (beberapa kritik dijalankan)

Kabupaten Indragiri Hulu (*Aktivitas Komunikasi*)

- Perbaikan pelayanan informasi publik
- Permudahan akses data dan informasi (belum sepenuhnya)
- Dorongan kebijakan anggaran yang respon terhadap wilayah penghasil Migas.

Kabupaten Indragiri Hulu (*Aktivitas Komunikasi*)

- Perbaikan layanan informasi publik
- Terlibat dalam proses penyusunan DBH DR.
- Kolaborasi dalam Sedagho Siak.
- Kolaborasi dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa

Kabupaten Meranti (*Aktivitas Komunikasi*)

- Perbaikan Layanan informasi publik
- Kolaborasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Kabupaten Meranti (*Aktivitas Komunikasi*)

- Perbaikan layanan informasi publik
- Terlibat full dalam penyusunan Peraturan Bupati (Khusus ADD berbasis Migas)
- Permudahan asistensi dalam perencanaan anggaran (khusus DBH DR)

Lembaga Negara Non Pemerintah

Komisi Informasi *(Aktivitas Komunikasi)*

- Pendampingan Komisi Informasi
- Terlibat full dalam penerbitan regulasi setingkat Komisi Informasi
- Asistensi dalam peningkatan kapasitas Komisi Informasi.
- Membangun kolaborasi KI Se Sumatera

Ombudsman Perwakilan Riau *(Aktivitas Komunikasi)*

- Terlibat menjadi sahabat Ombudsman (satu tim intens mengikuti perkembangan)
- Kolaborasi dalam perbaikan layanan publik

KPK RI *(Aktivitas Komunikasi)*

- Kolaborasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
- Permudahan akses narasumber, pertukaran data.

BPK RI *(Aktivitas Komunikasi)*

- Permudahan akses informasi LHP BPK untuk daerah se Provinsi Riau setiap tahun

Komisi Yudisial *(Aktivitas Komunikasi)*

- Terlibat kolaborasi dalam peningkatan pengawasan pengadilan.

KPU Riau *(Aktivitas Komunikasi)*

- Pertukaran informasi dan data

Bawaslu Riau *(Aktivitas Komunikasi)*

- Pertukaran informasi dan data
- Terlibat dalam pemantauan pemilu
- Sebagai member dalam peningkatan kapasitas
- Perbaikan layanan informasi Bawaslu Riau

Kampus

Universitas Riau *(Aktivitas Komunikasi)*

- Bekerjasama dengan FISIP UR dalam bentuk MoU
- Aktif terlibat dalam pendidikan kampus (politik anggaran)
- Kerjasama dengan lembaga mahasiswa untuk penguatan pengetahuan anggaran.

Universitas Riau *(Aktivitas Komunikasi)*

- Sebagai pengisi (kuliah umum) terkait politik anggaran di Fakultas FISIP.

Media Massa

Media massa local / nasional *(Aktivitas Komunikasi)*

- Menjadi barometer isu anggaran
- Penguatan kapasitas jurnalis terkait kebijakan anggaran
- Partner publikasi FITRA RIAU.

PETA NETWORKING FITRA RIAU :

No	Organization	Level	Status
1	Seknas FITRA	National	Anggota
2	PWYP Indonesia	National	Anggota
3	ICW	National	Mitra Kerja
4	Indonesia Budget Center	National	Mitra Kerja
5	Pattiro	National	Mitra Kerja
6	Indonesia Parlemetary Center (IPC)	National	Mitra Kerja
7	Shamdana Institut	National	Mitra Kerja
8	AKATIGA	National	Mitra Kerja
8	JIKALAHARI	Local	Anggora
9	Walhi Riau	Local	Partners
10	Yayasan Mitra Insani	Local	Partners
11	LBH Pekanbaru	Local	Partners
12	Riau Women Working Group (RWWG)	Local	Partners
13	Rupari	Local	Partners
14	Bunga Bangsa	Local	Partners
15	Lembaga Lainnya di Riau untuk kolaborasi isu-isu tertentu	Local	Partner

NETWORKING ADVOKASI FITRA RIAU BERDASARKAN ISU:

No	Isu	Mitra Kolaborasi	Aktivitas	Posisi FITRA
Lokal				
1	Koalisi keterbukaan informasi Provinsi Riau (KoKI Rakyat)	26 Lembaga CSO di Provinsi Riau	Mendorong KI Riau, Penguatan kapasitas CSO dan masyarakat, penguatan kapasitas badan publik	Leader
2	Mendorong Partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi (Forum Marwah)	Komunitas, Pemda, KPK	Penguatan kapasitas, kolaborasi monitoring, Rekomendasi, Pelaporan kasus	Komunikator
3	Jaringan Anti Korupsi Riau (JARI)	Komunitas	Menolak pelemahan KPK, Kampanye isu Korupsi,	Tim Inisiator
4	Kampanye Anti Nyontek Pelajar	Fitra Riau, Walhi, Seruni, Madrasah Anti Korupsi, Gusdurian, Jikalahari	Kampanye, Edukasi anti korupsi	Inisiator
5	Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Hak Angket KPK dan Penolakan Revisi UU KPK.	Fitra Riau, Mahasiswa	Aksi penolakan Hak Angket KPK	Inisiator
6	Forum Bela Anggaran Riau	35 CSO/Masyarakat	Penguatan kapasitas, kampanye	Inisiator
7	Koalisi GNPSDA Provinsi Riau	CSO Provinsi Riau	Kampanye, penguatan kapasitas	Pastisipan
8	Gerakan mendorong Implementasi Perhutanan Sosial	FITRA RIAU, JIKALAHARI, YMI, WALHI, JMGR	Kampanye, advokasi	Partisipan
9	Sedagho Siak	Lembaga Lokal dan Nasional	Kapacity building, advokasi	Partisipan
Nasional				
1	Mengawal implementasi UU 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Foi Network)	Lembaga-Lembaga Nasional dan Antar Daerah	Advokasi, penguatan kapasitas, asistensi PPID	Partisipan / Perwakilan Jaringan Wilayah Riau sejak 2010 - sekarang
2	Koalisi Mengawal Implementasi DBH DR	FITRA RIAU, dan lembaga lintas Provinsi	Advokasi, Assistensi, kampanye	Partisipan/ wakil Riau
3	EITI	Lembaga Nasional	Advokasi	Partisipan

JARINGAN LEMBAGA DONOR

Sejauh ini kerja-kerja FITRA RIAU dilaksanakan atas dukungan program dan kegiatan yang diinisiasi oleh lembaga – lembaga di Jakarta. Artinya FITRA RIAU menjadi pelaksana (mitra local) dari lembaga – lembaga tersebut.

Namun, sejak tahun 2016 Fitra Riau berhasil melakukan kerjasama langsung dengan lembaga donor seperti Asia Foundation dan GIZ hingga saat ini.

BAGIAN III

PROGRAM & KEGIATAN FITRA RIAU



Untuk menunjang tercapainya kerja-kerja advokasi dan mendukung eksistensi lembaga Fitra Riau beberapa program dan kegiatan telah dilakukan. Pada dasarnya tidak semua program atau kegiatan yang Fitra Riau lakukan memiliki hubungan langsung dengan core isu lembaga, karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan dengan Fitra Riau berorientasi pada isu kebijakan anggaran. Kerja-kerja diluar core isu tetap dilaksanakan dengan alasan seba-

gai upaya untuk menjaga eksistensi lembaga. Belum semua program dan kegiatan yang Fitra Riau laksanakan langsung berhubungan dengan lembaga donor. Sebagian kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 2011-2018 dilakukan atas kerjasama Fitra Riau dengan lembaga CSO di nasional atau sebagai mitra local di daerah. Beberapa kegiatan juga dilakukan atas kerjasama Fitra Riau dengan lembaga lain di Riau seperti Jikalahari, YMI, dll.

Berikut ringkasan program atau kegiatan yang telah dilakukan Fitra Riau atas kerjasama dengan donor dan mitra local sepanjang 2011-2018:

No	Program / Kegiatan	Donor/Mitra	Durasi / Tahun	Aktivitas
1	Kegiatan monitoring Pilkada Kabupaten Kampar	Mitra Lokal ICW	Juni – Desember 2011	Pemantauan Pemilu, Konferensi pres
2	Kegiatan Riset Potensi Penerimaan Negara dari Sektor Migas Provinsi Riau	Mitra Lokal ICW	Januari – Maret 2012	Penelitian, Konferensi Pres
3	Kegiatan Pengembangan BRC tahap I	Mitra Lokal Seknas Fitra	Januari – Mei 2012	Data dan Analisis, Media Breifing, Advokasi (kampanye), institutional support
4	Kegiatan Local Budget Indeks (LBI) dan Open Budget Survey	Mitra Lokal Seknas Fitra - TAF	Juni 2012- Januari 2013	Collecting data, data analisis, survey, kampanye media, diskusi publik
5	Kegiatan Pengembangan BRC Tahap II	Mitra Lokal Seknas FITRA - TAF	Januari – Mei 2013	Dana Analisis, Gugatan APBD, Kampanye Publik, Advokasi Dana Bansos dan Hibah
6	Kegiatan Evaluasi Parliamentary Threasold	Mitra Lokal IPC	Juni 2013	Diskusi Publik parlement
7	Kegiatan Pemantauan Pemilu Legislatif dan Presiden	Mitra Lokal ICW - ERIS	Maret – Oktober 2014	Pemantauan Politik Uang Dalam Pemilu 2014
8	Kegiatan Mengawal Pelaksanaan UU Desa Melalui Capacity Building bagi masyarakat dan pemerintahan Desa	Samdhana Institute – Jikalahari	Mei – November 2014	Kajian dan penguatan kapasitas pemerintah desa
9	Kegiatan Riset potensi penerimaan Negara sektor kehutanan	Mitra Jikalahari	Sept – Des 2014	Penelitian, data analisis
10	Program Reversing The Resources Course - Mendorong transparansi penerimaan Negara dari Migas untuk penanggulangan kemiskinan	Mitra PWYP – Ford Foundation	Januari 2014 – Juli 2015	Penguatan kapasitas, advokasi kebijakan anggaran, kajian, data analisis, konsolidasi masyarakat sekitar migas, mendorong add berbasis migas.
11	Program Mendorong perbaikan tata kelola keuangan partai politik	Mitra ICW - (MSI)	Tahun 2015	Akses Informasi Keuangan Partai Politik, kampanye, asistensi partai politik
12	Kegiatan Pemetaan Jaringan Anti Korupsi Provinsi Riau	Mitra ICW	Tahun 2016	Penelitian, konsolidasi, briefing media
13	Local Budget Indeks dan Budget Analisis (3 Kabupaten)	Mitra Seknas Fitra	Tahun 2016	Survey, data analisis, media briefing
14	Program – Mendorong Perbaikan Tata Kelola Hutan dan lahan (Setapak II) tahap I	The Asia Foundation (TAF)	Desember 2015- Desember 2016	Adokasi Transparansi TKHL, Advokasi kebijakan anggaran Lingkungan Hidup, Penguatan kapasitas, pendampingan desa, pemerintah daerah.

15	Kajian Potensi Korupsi BNPB Sektor Kehutanan (Budget Tracking)	Mitra ICW	2017	Data Analisis, Investigasi, Budget Tracking, media briefing.
16	Pengawasan Seleksi Komisi Informasi Provinsi Riau dan Pusat Periode 2017-2021	Mitra Lokal ICW	2016-2017	Tracking Calon, Media Briefing, Uji Kelayakan Berbasis Masyarakat, Pengawasan proses seleksi di DPRD
17	Local Budget Index (LBI) Untuk program : “ To develop a portal for data and information on local budgets and rank the regencies and cities in accordance to pro-poor and gender budgeting criteria” untuk daerah Kab/Kota Indragiri Hulu, Kab Bengkalis dan Kota Pekanbaru	Mitra Lokal Seknas Fitra	2016	Survey, Data Analisis, Kampanye, media briefing
18	Program – Mendorong Perbaikan Tata Kelola Hutan dan lahan (Setapak II) tahap II	The Asia Foundation	Des 2016- Des 2017	Advokasi Transparansi TKHL, Advokasi kebijakan anggaran Lingkungan Hidup, Penguatan kapasitas, pendampingan desa, pemerintah daerah
19	Mengawal Implementasi ADD Berbasis SDA Di Pelalawan (Tahap I)	PWYP Indonesia	Mei – Des 2017	Penguatan kapasitas desa, pembentukan komunitas, pendampingan desa dan pemerintah daerah Pelalawan
20	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi di provinsi Riau (Tahap I)	GIZ Deutsche Gesellschaft Fur international Zusammenarbeit	2017	Penguatan kapasitas, Konsolidasi pemerintah, Monitoring kolaborasi 12 desa 6 kabupaten. Diseminasi. Mengawal rencana aksi pencegahan korupsi Provinsi Riau
21	Kegiatan Pencegahan Fraud dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS)	Mitra Lokal ICW	2017	Penguatan kapasitas, Pendampingan pasien, Pelaporan kasus, media briefing
22	Program – Mendorong Perbaikan Tata Kelola Hutan dan lahan (Setapak II) tahap III	The Asia Foundation	Des 2017- Sekarang	Advokasi Transparansi TKHL, Advokasi kebijakan anggaran Lingkungan Hidup, Penguatan kapasitas, pendampingan desa, pemerintah daerah
23	Mengawal Implementasi ADD Berbasis SDA di Pelalawan (Tahap II) (Penguatan kapasitas BPD	PWYP Indonesia	Mei 2018- Sekarang	Penguatan kapasitas BPD Desa pembentukan komunitas, pendampingan desa dan pemerintah daerah pelalawan
24	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi di provinsi Riau (Tahap II)	GIZ Deutsche Gesellschaft Fur international Zusammenarbeit	2017 – Sekarang	Penguatan kapasitas, Konsolidasi pemerintah, Monitoring kolaborasi 12 desa 6 kabupaten. Diseminasi. Mengawal rencana aksi pencegahan korupsi Provinsi Riau

Sedangkan agenda-agenda kegiatan FITRA Riau yang dilakukan tanpa support kegiatan dan program dari lembaga lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Aktivitas
1	Mendorong penghapusan anggaran bansos dan hibah Daerah 2013-2014	Data analisis, investigasi, publikasi data hibah dan bansos, konsolidasi CSO
2	Gerakan menolak anggaran pengadaan mobil Dinas Gubernur dan DPRD Riau 2014	Data Analisis, Press rilis, media briefing, aksi bersama HMI
3	Catatan Akhir tahun Anggaran 2014	Data analisis, Media briefing
4	Sekolah Anggaran Fitra Riau (2015)	Pelatihan, Magang
5	Catatan Akhir tahun anggaran 2015	Data analisis, Media briefing
6	Pendidikan anti Korupsi di sekolah SMA Pekanbaru (2017-2018)	Diskusi, Pendampingan, Pelatihan
7	Gerakan menolak pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK 2018	Serial Diskusi, Konsolidasi, aksi massa
8	Kampanye kasus korupsi RTH Provinsi Riau (2018) dan mengawal renaksi PK 2018	Media Briefing
9	Gerakan Momentum Indonesia Women Day (IWD) Provinsi Riau	Kampanye, Aksi bersama PPSW, Seruni, dan organisasi perempuan
10	Konsolidasi Gerakan Perempuan melek Anggaran (2018)	Diskusi, Penguatan kapasitas, Konsolidasi
11	Gerakan 1000 Gerakan menolak kekerasan terhadap perempuan dan anak (2018)	Diskusi, Kampanye
12	Press Rilis Bulanan mengawal kebijakan anggaran	Kampanye

Keberhasilan & Capaian



Melalui upaya kerja-kerja advokasi yang dilakukan Fitra Riau baik sendiri maupun berkolaborasi/mitra bersama sebagaimana uraikan pada bagian sebelumnya, melalui agenda dan strategi penguatan kapasitas,

pendampingan, advokasi litigasi dan non litigasi, pemberdayaan, kajian dan penelitian, hingga saat ini beberapa capaian yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut :



KELEMBAGAAN (INTERNAL)

No	Komponen	pencapaian	catatan
1	Legalitas	Telah memiliki badan hukum jelas dan telah diakui melalui terdaftarnya FITRA RIAU di kemenkum dan HAM. Mendapat kepercayaan publik, pemerintah, antar CSO, media, dan lembaga Donor	Harus terus memperkuat komunikasi networking Meningkatkan kepercayaan donor
2	Management dan Personil	Telah memiliki personil yang cukup Dukungan (support) pendanaan yang cukup untuk eksistensi lembaga telah memiliki SOP untuk pedoman kelembagaan dan keuangan Memiliki personil khusus pengelola keuangan Memiliki rekening lembaga	Perlu ditingkatkan fungsi personil, Penguatan kapasitas personil, Memperkuat bidang perencanaan dan program. Membangun jaringan support (donor) lembaga Penguatan personil khususnya bidang advokasi dan riset. Perlu adanya Resntra Lembaga Fitra Riau untuk mempedomani kerja lembaga
3	Fasilitas	Telah memiliki asset pendukung kerja lembaga, Memiliki media kampanye (website) Penguatan Data base Anggaran	Kantor masih sewa Perlu dukungan fasilitas pendukung BRC Perlu mendorong fund raising lembaga untuk kemandirian kelembagaan

ADVOKASI

Isu Kebijakan Anggaran Daerah

Melalui kerja-kerja advokasi yang dilakukan dengan menggunakan strategi yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu pendekatan resource center, kajian, kampanye publik, pendampingan / asistensi pengambil kebij-

kan, lobby, hingga melakukan advokasi litigasi yaitu dua kali melakukan Judicial review (JR) APBD Provinsi Riau pada tahun 2013 dan 2017. Beberapa capaian yang telah dihasilkan yaitu :

No	Upaya/Strategi	Capaian
1	Data analisis, kajian, kampanye publik, dan advokasi Litigasi (Pengajuan Permohonan JR APBD yang dilakukan pada tahun 2013)	Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu 20% Pendidikan dan 5 % Kesehatan
2	Data analisis, Kajian, kampanye publik, dan pelaporan kasus hasil investigasi penerima dana hibah dan Bansos tahun 2012-2013 dan pengajuan permohonan gugatan ke MA	Penurunan alokasi anggaran hibah dan bansos provinsi Riau bahkan dihapus pada tahun 2014. Fitra Berkontibusi dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut oleh Menteri dalam Negeri. Mencegah Rp. 124 Milyar dana Bansos dan Hibah Provinsi Riau (gagal salur)
3	Data analisis, kajian, kampanye media, konsolidasi komunitas.	Pembatalan rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau sebesar Rp. 67 Milyar tahun 2015
4	Data Analisis, Kajian, kampanye media, dan konsolidasi aksi bersama mahasiswa 2015	Penundaan dan Pembatalan Rencana Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Rp. 9,4 Milyar.
5	Data analisis, kajian, kampanye (pressure media) dan konsolidasi aksi 2016	Pembatalan pengadaan Mobil anggota DPRD sebesar Rp. 32 Milyar.
6	Data Analisis, Kajian, Kampanye media dan konsolidasi gerakan ke masyarakat. (2016)	Pembatalan Proyek Pengadaan security gedung DPRD sebesar Rp. 6.5 Milyar.
7	Data Analisis, kajian kampanye media (pressure pemerintah)	Pembatalan rencana perjalanan Dinas DPRD tahun 2016 dengan anggaran Sebesar Rp. 17 Milyar.
8	Data analisis, kajian (policy brief), usulan kebijakan, lobi, dan kampanye publik (2015)	Adanya pagu indikatif wilayah penghasil Migas berdasarkan kecamatan untuk daerah di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2015
9	Data analisi, kajian, diskursus, loby.	Meningkatnya alokasi anggaran untuk Kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 dari Rp. 4 Milyar menjadi Rp. 23 Milyar.
10	Data analisis, kajian, diskusi, loby, 2017	Mendorong bantuan keuangan Provinsi ke Desa tahun 2017 sebesar Rp. 159,2 Milyar tahun 2017
11	Diskusi, loby dan advokasi	Tersedianya data anggaran di Dinas DPKAD Riau sejak tahun 2016 – sekarang secara detail.
12	Data analisis, kajian, loby, diskursus, dan intervensi kebijakan	Meningkatnya anggaran daerah Kabupaten pelalawan untuk karhutla dari Rp. 800 juta pertahun menjadi Rp. 5,4 Milyar tahun 2017,2018

13	Data analisis, kajian, lobi, intervensi kebijakan di Kabupaten pelalawan (2016)	Terbitnya Pergub ADD Berbasis SDA di Kabupaten pelalawan. Sebagai upaya mendorong keadilan distribusi anggaran ke daerah penghasil SDA di Pelalawan.
14	Data Analisis, Kajian, Intervensi Kebijakan, asistensi 2018	Penggunaan DBH DR di Kabupaten dan Provinsi Riau

Selain dari yang diuraikan diatas, tentunya masih banyak lagi capaian lain yang tidak bisa dikuantifikasikan. Seperti, proses penganggaran yang mengedepankan prinsip keterbukaan, efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan atau program rutin pemerintah, menurunnya alokasi belanja perjalanan dinas di provinsi Riau, Fitra Riau memiliki peran dan berkontribusi melalui upaya advokasi, kampanye publik yang telah dilakukan.

Beberapa catatan terkait dengan advokasi Kebijakan anggaran ini, bahwa FITRA RIAU belum mampu memperluas gerakan dalam pengawasan kebijakan anggaran hingga ke semua Daerah di provinsi Riau. Fitra Riau baru mampu menjangkau untuk wilayah provinsi dan beberapa kabupaten saja.

Selain itu, untuk kebijakan anggaran Fitra Riau belum masuk secara detail pada isu pendapatan daerah, yang banyak dilakukan oleh Fitra Riau lebih kepada pengelolaan belanja daerah. Catatan ini menjadi penting untuk arah advokasi Fitra Riau kedepan.

Isu Transparansi Informasi Publik

Pada isu transparansi upaya yang dilakukan dengan pendekatan masyarakat, badan publik dan Komisi Informasi. Pendekatan tersebut dilaksanakan dengan strategi akses informasi, penguatan kapasitas, pendampingan / asistensi dan kampanye publik. Hal-hal yang telah tercapai pada isu tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen / Pendekatan	Capaian	Catatan
1	Badan Publik	<p>Melalui agenda kampanye publik, pendampingan, sengketa informasi, hingga saat telah mencapai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah berhasil mendorong perbaikan system pelayanan informasi di Provinsi Riau dan 4 Kabupaten (Inhu, Pelalawan, Siak dan Meranti) untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Seperti PPID, SOP, Daftar Informasi Publish, dan peraturan Gubernur/Bupati terkait dengan Pelayanan Informasi Publik. • Tersedianya informasi anggaran daerah melalui website pemerintah diantara (Provinsi Riau, Indragiri Hulu). 	Perlu perluasan daerah lainnya di Riau Mendorong badan Publik membuka informasi secara proaktif (khusus anggaran). Perlu pengujian melalui gerakan masyarakat.

2	Komisi Informasi	<p>Melalui hasil kolaborasi, asistensi, penguatan kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya KI Provinsi Riau atas gerakan koalisi masyarakat sipil di Riau. Fitra Riau sebagai leader dalam koalisi tersebut. • 2013-2018 terdapat 32 kali FITRA RIAU mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi Riau. • Menerbitkan 5 regulasi setingkat KI Provinsi Riau (3 SE dan 2 SK) untuk mendorong badan publik membuka informasi secara pro aktif. • Mudahnya akses masyarakat terhadap informasi tertentu pasca lahirnya SK dan SE KI Riau. 	Perlu terus melakukan penguatan KI agar memiliki peran strategis dalam mendorong keterbukaan informasi di Riau
3	Masyarakat	<p>Melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas dan pendampingan hingga saat ini telah dicapai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • CSO dan masyarakat menggunakan instrument UU KIP dalam mengakses informasi publik hingga sampai sengketa di komisi informasi. • Komunitas dampingan FITRA Riau di Inhu, Bengkalis, Pelalawan melakukan gerakan advokasi anggaran dari hasil akses data dan informasi publik. 	Peran masyarakat sangat penting untuk mendukung gerakan keterbukaan informasi. Sehingga perlu penguatan masyarakat terkait dengan pentingnya keterbukaan informasi menjadi sangat penting.

Advokasi Isu Korupsi Anggaran Daerah

Semangat anti korupsi selaras dengan upaya Fitra Riau untuk mewujudkan kebijakan anggaran yang transparan dan akuntabel. Fitra Riau terus melakukan advokasi untuk mencegah praktek korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan kerjasama berbagai pihak seperti; pemerintah daerah, CSO/NGO dan mahasiswa. Beberapa capaian hingga saat Fitra Riau bersama jaringan masyarakat sipil anti korupsi di Riau berhasil mendorong agenda pencegahan korupsi dalam rencana aksi pencegahan korupsi Provinsi Riau. Adapun agenda tersebut seperti:

- Rencana Aksi pencegahan korupsi yang berkaitan dengan Perbaikan tata Kelola SUMBERDAYA Alam (Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan) (Bersuama koalisi GNPSDA Riau)

- Perbaikan dalam tata kelola pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Dana Desa hasil dari rekomendasi kolaborasi monitoring bersama masyarakat dan pemerintah daerah tahun 2017.
- Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu masuknya publikasi dokumen kontrak kerja pelaksana pengadaan barang dan jasa dalam rencana Aksi.
- Memperluas gerakan pemilu bersih melalui pemantauan politik uang. Fitra Riau adalah pihak pertama melakukan pelaporan politik uang pada Pileg 2014 hingga ke Pengadilan, menjadi contoh pada pelaksanaan pemilu berikutnya yang marah laporan dan vonis politik uang di Riau.



Jl. Kartama/Inpres Gg. Bambu No 5 Kel. Maharatu,
Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru



(0761) 566833



Sekretariat.fitrariau@gmail.com



Fitra Riau



@fitraprovinsiriau

WWW.FITRARIAU.ORG